

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data pada bab v dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis rasio Efektivitas PAD, kabupaten TTS berada pada kriteria sangat efektif dengan rasio diatas 100%. Berdasarkan hasil analisis efektivitas PAD Tahun 2014, kabupaten TTS berada pada tingkat sangat efektif karena realisasinya melebihi target yang ingin dicapai dengan capaian rasio sebesar 127,75%. Tahun 2015, kabupaten TTS masih berada pada tingkat sangat efektif karena realisasinya melebihi target dengan capaian rasio sebesar 117,02%. Tahun 2016, Kabupaten TTS berada pada tingkat efektif karena realisasinya mendekati target yang ingin dicapai dengan selisih antara target dan realisasi sebesar Rp. 6,106,591,716 dengan capaian rasio sebesar 92,13%, dengan nilai rata – rata selama tiga (3) tahun yaitu sebesar 112,3%.
2. Berdasarkan hasil analisis rasio Efisien Keuangan Daerah, kabupaten TTS berada pada tingkat cukup efisien dengan rasio 80%-90%. Tahun 2014, kabupaten TTS berada pada tingkat cukup efisien karena pemerintah daerah melakukan belanja sesuai dengan pendapatan yang diterima dengan capaian rasio sebesar 89,77%. Tahun 2015, kabupaten TTS masih berada pada tingkat cukup efisien karena mampu menekan

pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang diterima dengan capaian rasio sebesar 85,40%. Tahun 2016, kabupaten TTS berada pada tingkat cukup efisien karena mampu menekan pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang diterima dengan rasio sebesar 87,92% dengan nilai rata – rata selama tiga (3) tahun yaitu sebesar 87,69%.

3. Berdasarkan hasil analisis rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Kabupaten TTS mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dengan rasio yang dicapai diatas 50%. Tahun 2014, tingkat capaian kabupaten TTS sebesar 93,17%. Tahun 2015 capaian rasio kabupaten TTS sebesar 92,93%. Tahun 2016 capaian rasio kabupaten TTS sebesar 94,04%, sehingga total rata – ratanya mencapai angka 93,38% dengan nilai rata – rata selama tiga (3) tahun yaitu sebesar 93,38%.
4. Berdasarkan hasil analisis rasio kemandirian daerah, kabupaten TTS berada pada pola hubungan Instrukturif dimana peran pemerintah lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dan tingkat kemampuan daerah yang rendah dengan rasio yang dicapai berkisar 0%-25%. Tahun 2014, capaian rasio kabupaten kabupaten TTS sebesar 7,98%. Tahun 2015, capaian rasio kabupaten TTS sebesar 9,12%. Tahun 2016, capaian rasio kabupaten TTS sebesar 7,92% dengan nilai rata – rata selama tiga (3) tahun yaitu sebesar 8,13%.
4. Berdasarkan hasil analisis rasio derajat desentralisasi fiskal, pemerintah daerah kabupaten TTS masih sangat kurang untuk melaksanakan

desentralisasi fiskal karena pendapatan daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat masih lebih besar dari pendapatan asli daerah dan semakin meningkat setiap tahun. Rasio yang dicapai masih dibawah 10%. Tahun 2014, capaian rasio di Kabupaten TTS sebesar 6,72%. Tahun 2015, capaian rasio di Kabupaten TTS sebesar 7,07%. Tahun 2016, capaian rasio di Kabupaten TTS sebesar 5,95% dengan nilai rata – rata selama tiga (3) tahun yaitu sebesar 6,58%.

6. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan pendapatan pada kabupaten TTS pertumbuhan pendapatan mengalami fluktuasi. Tahun 2014 angkanya mencapai 9,78%, tahun 2015 naik sebesar 16,83% dan tahun 2016 turun menjadi 11,66% dengan nilai rata – rata selama tiga (3) tahun yaitu sebesar 12,75%.

## **1.2 Saran**

Adapun saran-saran yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan terus meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada serta menggali sumber PAD yang baru terutama untuk penerimaan pajak dan retribusi yang merupakan sumber keuangan yang penting dan utama bagi daerah agar bisa memberikan kontribusi yang besar bagi daerah serta mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dari pusat.

2. Pemerintah daerah harus meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memberikan sosialisasi secara berkelanjutan akan pentingnya membayar pajak dan retribusi.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih rinci lagi menganalisis kinerja pemerintah daerah dengan perubahan waktu dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Puput Risky Pramita, 2015. Analisis Rasio Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang *Daerah: Studi Kasus Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada
- Anonimous. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
- Anonimous. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah*
- Anonimous. 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Anonimous. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Anonimous. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Assidiqi, Bahrun. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2012*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Bisma, I Dewa Gde & Hery Susanto. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jurnal. GaneC Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3, Mataram.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berupa data *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014-2016*
- Depdagri, Kepmendagri No. 690. 900. 372 tahun 1996 tentang *Kriteria untuk Mengukur Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Hanafi, Imam & Mugroho, Tri Laksono.2009. *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Malang: UB Press
- Masdiantini dan Erawati, (2016). *Analisis Temuan dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten / Kota se Propinsi Bali*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Udayana Bali
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mahsun, Moh, Firma Sulistyowati & Heribertus Andre Purwanugraha. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mahsun, Mohammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mulyadi. 2007. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono.2013.*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta
- Supriyanto.1985.*Defenisi Anggaran*.[Http://wonkcbr.blogspot.com/2010/12.html](http://wonkcbr.blogspot.com/2010/12.html)
- Suparmoko M.A.2002.*Ekonomi Publik untuk Keuangan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi